

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAB INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah



TRIWULAN I TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

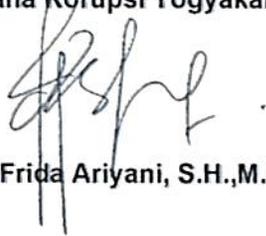
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta

Pada Hari Jumat, 8 April 2022

Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan
tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA,



Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, yang dilakukan secara elektronik.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan dan pengguna layanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 1 April 2022

Tim Survei

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran	2
D. Landasan Hukum	2
E. Definisi.....	3
BAB II. METODOLOGI	
A. Metode Penelitian.....	4
B. Populasi Dan Sampel.....	4
C. Pelaksanaan dan Teknik Survei.....	5
D. Teknik Analisis dan Evaluasi.....	5
E. Tim Survei IPAK	6
F. Prosedur Survei.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
A. Profil Responden.....	8
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	13
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja.....	20
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta	21
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	23
B. Rekomendasi.....	23
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Kelamin Responden	8
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden	9
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden	10
Tabel 4. Domisili Responden	11
Tabel 5. Usia Responden.....	12
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	13
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	14
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	15
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah	16
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Percaloan	17
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang.....	18
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	19
Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	20
Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	21

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	8
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden	9
Grafik 3. Pekerjaan Responden	10
Grafik 4. Domisili Responden.....	12
Grafik 5. Rentang Usia Responden	13
Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan.....	14
Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	15
Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh	16
Grafik 9. Indikator Pemberian Hadiah.....	17
Grafik 10. Indikator Percaloan.....	18
Grafik 11. Indikator Perbuatan Curang	19
Grafik 12. Indikator Transaksi Rahasia.....	20
Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif kegiatan pencegahan cegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

- a. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
- b. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Illegal profit;
4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme

BAB II METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

Dengan memperhatikan jumlah pegawai aparat peradilan pada lingkungan peradilan umum kurang lebih sebanyak 130 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 150 orang.

C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e- survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan selama periode triwulan I Tahun 2022. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. PERSIAPAN

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey

2. PROSES SURVEI

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website dan meja pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.
- b) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E- survey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- c) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey

D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam

penelitian ini.

2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARIKORUPSI.

E. TIM SURVEI IPAK

Tim Survei IPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri dari:

Tim Survei IKM Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri dari:

Penanggungjawab : Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum

Ketua : Heri Kurniawan, S.H., M.H

Sekretaris 1 : Surya Eka Setiawan, S.H

Sekretaris 2 : Nindya Yosdalu Putra

Anggota : Dian Umawati, S.H., M.H.

Yenny Vikky Effendy, S.T., S.H., M.Eng

Waljiyanto, S.T., M.M.

Jeane Pamela., S.Kom., M.T.

Salasa Agus Eko Yadi, S.H.

Nugraha Abdillah, S.Kom.

Bariyah

F. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telp dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator- indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tmabahan
6. Hadiah

7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin Responden

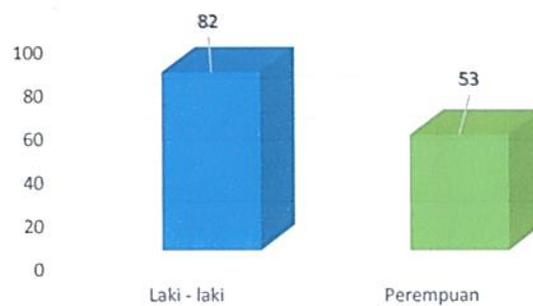
Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 135 reponden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki – Laki sebanyak 62 orang atau 62% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 57 orang atau 38%.

Tabel Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	82	60,740
2	Perempuan	53	39,259
Jumlah		135	100

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Grafik Jenis Kelamin Responden



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

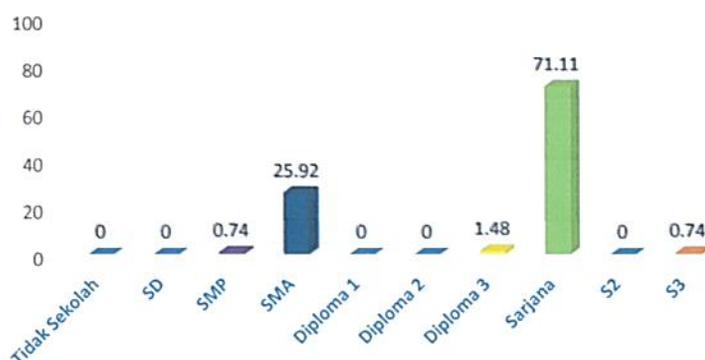
2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industriial dan Tindak Pidanan Korupsi Yogyakarta Kelas IA mayoritas memiliki latar belakang tingkat Sjana (Setrata 1) sebanyak 96 orang atau 7,11% .

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	1	0,74
4	SMA	35	25,92
5	Diploma 1	0	0
6	Diploma 2	0	0
7	Diploma 3	2	1,48
8	Sarjana	96	71,11
9	S2	0	0
10	S3	1	0,74
Jumlah		135	100

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 66 orang atau 48,88% responden atau mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana korupsi Yogyakarta Kelas IA memiliki pekerjaan sebagai pekerja lainnya..

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	12	8,88
2	TNI	0	0
3	POLRI	15	11,11
4	Pegawai Swasta	41	30,37
5	Wirausaha	1	0,74
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	66	48,88
Jumlah		135	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Pekerjaan Responden

4. Domisili Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari jumlah pengguna layanan terbesar dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total responden sebanyak 104 orang.

NO	Daerah Domisili	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	104	77,03
2.	Jawa Tengah	2	1,48
3.	Jawa Timur	23	17,03
4.	Banten	5	3,70
5.	Sumatra Selatan	1	0,74
TOTAL		135	100

Tabel 4. Domisili Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 4. Domisili Responden

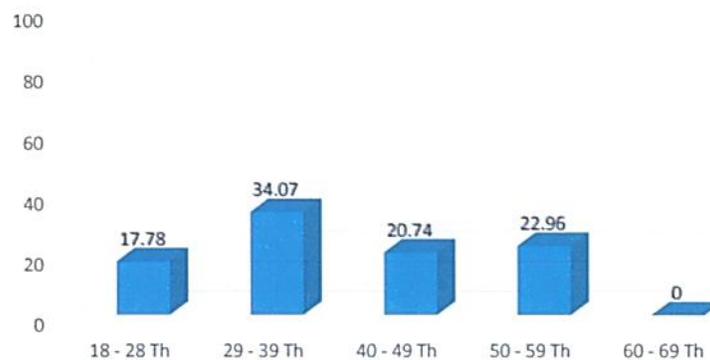
5. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 29 – 39 Tahun dengan prosentase sebesar 34,07% dari total responden.

NO	Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
1	18 - 28 Th	24	17,78
2	29 - 39 Th	46	34,07
3	40 - 49 Th	28	20,74
4	50 - 59 Th	31	22,96
5	60 - 69 Th	6	4,44
6	Total	135	

Tabel 5. Usia Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Rentang Usia Responden

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Manipulasi Peraturan

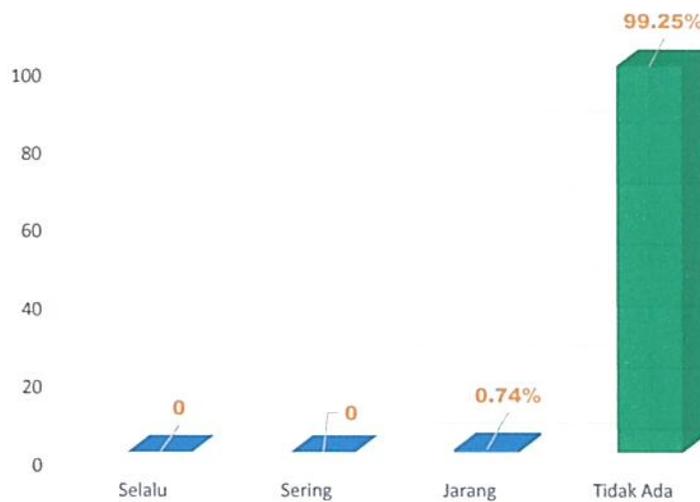
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan menunjukkan hasil 99,25% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manipulasi peraturan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup manipulasi peraturan dengan pertanyaan “ Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? ” dapat disajikan pada tabel berikut ini :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,74
4	Tidak Ada	4	134	99,25
Jumlah			135	100,00

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

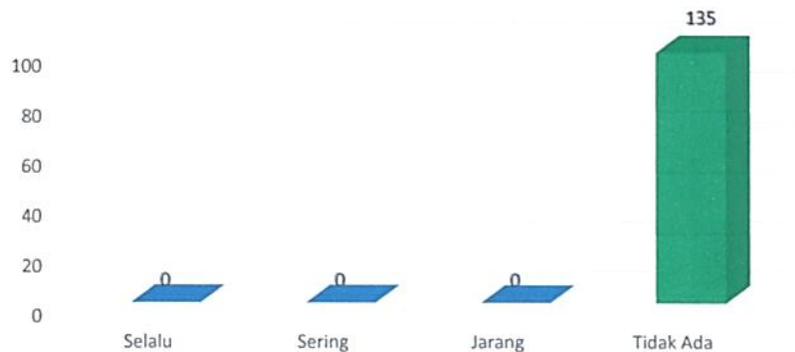
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan menunjukkan hasil 100% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan jabatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup penyalahgunaan jabatan dengan pertanyaan "Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	135	100
Jumlah			135	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan

Jabatan Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3. Indikator Menjual Pengaruh

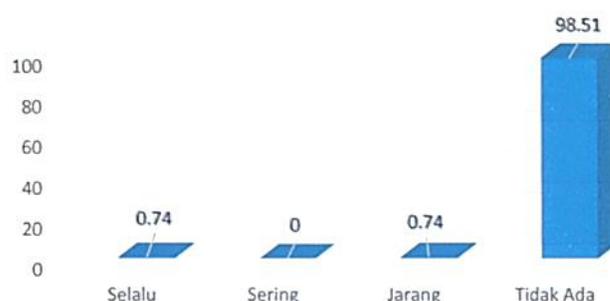
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh menunjukkan hasil 98,51% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat menjual pengaruh pada Pengadilan

Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup menjual pengaruh dengan pertanyaan "Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	1	0,74
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,74
4	Tidak Ada	4	133	98,51
Jumlah			135	100,00

Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh

4. Indikator Transaksi Biaya

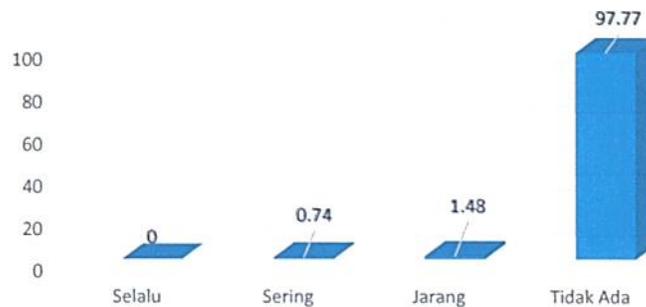
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator biaya menunjukkan hasil 97,77% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pemberian hadiah pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup transaksi biaya dengan pertanyaan "Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	0,74
3	Jarang	3	2	1,48
4	Tidak Ada	4	132	97,77
Jumlah				100,00

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 9. Indikator Transaksi Biaya

5. Indikator Biaya Tambahan

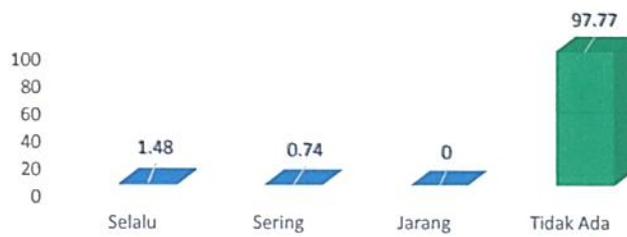
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan menunjukkan hasil 97,77% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada biaya tambahan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup biaya tambahan dengan pertanyaan "Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	2	1,48
2	Sering	2	1	0,74
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	132	97,77
Jumlah			135	100,00

Tabel 10. Indeks Pada Biaya Tambahan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 10. Indikator Biaya Tambahan

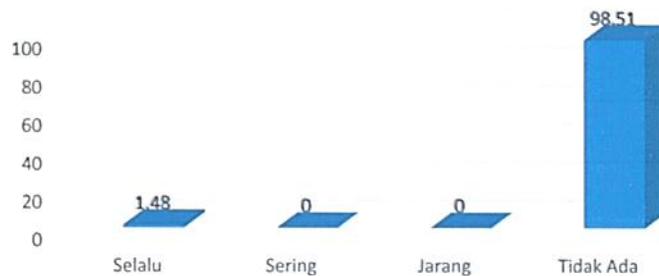
6. Indikator Hadiah

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator hadiah menunjukkan hasil 98,51% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pemberian hadiah pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	2	1,48
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	133	98,51
Jumlah			135	100,00

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Hadiah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 11. Indikator Hadiah

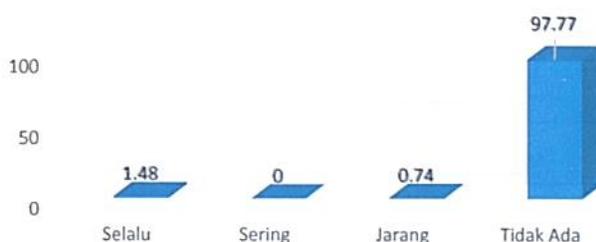
7. Indikator Transparansi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Transparansi biaya menunjukkan hasil 97,77% responden menyatakan selalu, berarti dapat disimpulkan bahwa selalu adanya transparansi biaya pada Pengadilan Negeri,

Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak ada	1	2	1,48
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	1	0,74
4	Selalu	4	132	97,77
Jumlah			135	100,00

Tabel 12. Indeks Pada Indikator Tranpasransi Biaya
Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 12. Indikator Transparansi Biaya

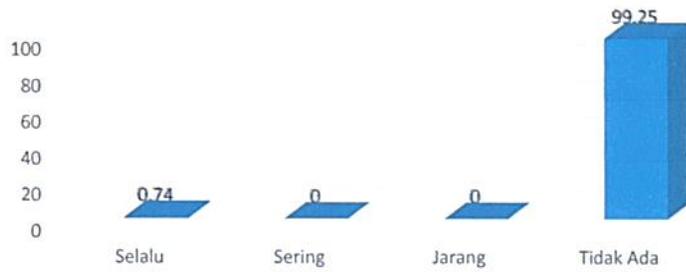
8. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Percaloan menunjukkan hasil 99,25% responden menyatakan Tidak Ada, berarti dapat disimpulkan bahwa Tidak adanya Percaloan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	1	1	0,74
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	134	99,25
Total			135	100

Tabel 13. Indikator Percaloan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 13. Indikator Percaloan

9. Indikator Perbuatan Curang

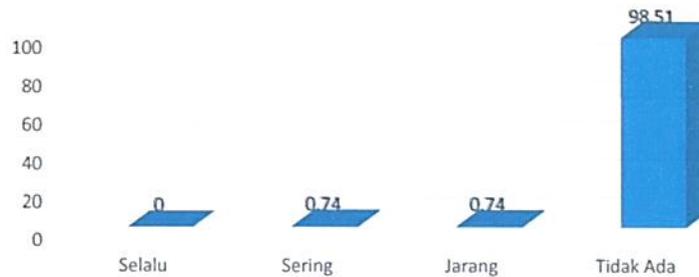
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator perbuatan curang menunjukkan hasil 99,51% responden menyatakan Tidak Ada, berarti dapat disimpulkan bahwa Tidak adanya Percaloan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Percaloan dengan pertanyaan “Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?” dapat disajikan pada tabel berikut ini :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	1	0,74
3.	Jarang	3	1	0,74
4.	Tidak Ada	4	133	98,51
Total			135	100

Tabel 14. Indikator Perbuatan Curang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 14. Perbuatan Curang

10. Transaksi Rahasia

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator perbuatan curang

menunjukkan hasil 100% responden menyatakan Tidak Ada, berarti dapat disimpulkan bahwa Tidak adanya Percaloan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transaksi Rahasia dengan pertanyaan “Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?” dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	135	100
Total			135	100

Tabel 15. Transaksi Rahasia

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 15. Transaksi Rahasia

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebesar 3,97.

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata - rata	Rangking
1	Manipulasi Peraturan	3,99	3
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	1
3	Menjual Pengaruh	3,97	6
4	Transaksi Biaya	3,97	7
5	Biaya Tambahan	3,94	5
6	Hadiah	3,96	8
7	Transparansi Biaya	3,94	9
8	Percaloan	3,97	4
9	Perbuatan Curang	3,97	5
10	Transaksi Rahasia	4,00	2
Jumlah		39,97	

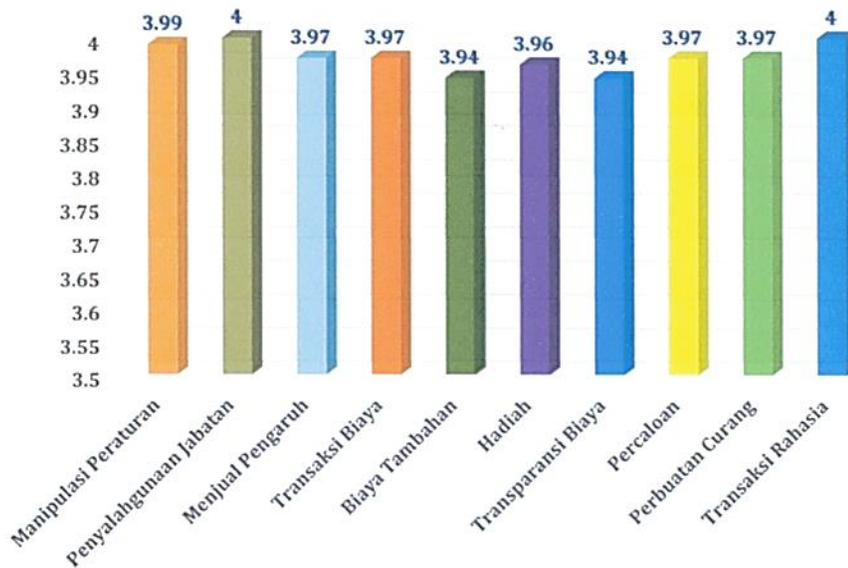
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Yogyakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 17. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.



Grafik 17. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks 3,97 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 99,33% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,97** atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Dengan demikian, petugas pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Selanjutnya, dari Nilai IPAK yang telah diperoleh dari masyarakat sebagai pengguna layanan maka dapat disimpulkan layanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA **bebas dari korupsi**.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu, **Biaya tambahan, Transaksi Biaya, dan Hadiah** yang dinilai cukup bersih dari korupsi tetapi kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun persentasinya kecil. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil e-survey IPAK terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, maka perlu upaya untuk memperbaiki **Biaya Tambahan, Transaksi Biaya, dan Hadiah** sehingga proses pemberian layanan akan terpantau dalam semua tahapan.

Untuk memperbaiki indikasi **perbuatan curang** direkomendasikan:

- Untuk Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang lebih aktif mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Untuk memperbaiki indikasi **hadiah** direkomendasikan:

- Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Untuk memperbaiki indikasi *percaloan* direkomendasikan :

- Masing-masing Pejabat memastikan bahwa seluruh layanan yang telah diberikan kepada pengguna layanan sudah sesuai dengan SOP dan standar layanan yang telah ditentukan

Selanjutnya laporan dan rekomendasi ini akan dibahas pada rapat pimpinan.

**INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN NEGERI,
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA
Tri Wulan I (Januari - Maret 2022)**

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NILAI INDEKS

3,97 / 99,33 %

Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

JUMLAH	135 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	82 ORANG
	PEREMPUAN	53 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah	0 ORG
	SD	0 ORG
	SMP	1 ORG
	SMA	35 ORG
	Diploma 1	0 ORG
	Diploma 2	0 ORG
	Diploma 3	2 ORG
	S1	95 ORG
	S2	0 ORG
	S3	1 ORG
PEKERJAAN	PNS	12 ORG
	TNI	0 ORG
	POLRI	15 ORG
	LAINYA	66 ORG
	SWASTA	41 ORG
	WIRASUSAHA	1 ORG
	TENAGA KONTRAK	0 ORG

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN
ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR
TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

Indeks Total	Data Umum Responden		Data Dumisil Responden		Data Umur Responden		Data Layanan		Nilai Per Unsur		
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	539	540	536	536	532	534	533	537	537	540	
NRR Per RL	3.993	4.000	3.970	3.970	3.941	3.956	3.948	3.978	3.978	4.000	39.733
NRR Tertimbang	0.399	0.400	0.397	0.397	0.394	0.396	0.396	0.398	0.398	0.400	3.973
IPAK Unt Pelayan											3.97
EVALUASI NILAI UNSUR											
3 Unsur Terendah			3 Unsur Tertinggi								
No.	Unsur										Nilai
1	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?										532
2	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?										533
3	Apakah memberikan tanda terima kash atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?										534

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER

Survei Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survei bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

1 Data Responden

Layanan

Form Kuesioner

Kesan & pesan

Data Responden SPAK

Nama

Umur / Jenis Kelamin

Nomor HP

Domisili

Pendidikan

Pekerjaan

sebutkan jika pekerjaan di pilih lainnya

http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id/...

APLIKASI SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIK

Form kuesioner untuk survei bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

1 Data Responden

Layanan

Form Kuesioner

1. Apakah prosedur prosedur digital tersedia / tersedia secara merata?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

2. Apakah fitur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

3. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

4. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

5. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

6. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

7. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

8. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

9. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak

10. Apakah prosedur yang tersedia di aplikasi dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah?

Tersedia / Tidak tersedia

Ya / Tidak